

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

BULETIN DWI WULAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Edisi I / 2013

**Harmonisasi Sistem Logistik Nasional, Pembangunan Infrastruktur,
dan Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi**

Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum

Pisah Sambut Kepala Badan Pembinaan Konstruksi

**MEMAKNAI HAKEKAT PEMBENTUKAN
USBU & USTK LPJK**

ISSN 1907-0136
9 771907 013646

**BULETIN BADAN
PEMBINAAN KONSTRUKSI**

Pembina/Pelindung :
Kepala Badan Pembinaan Konstruksi .

Dewan Redaksi :
Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Usaha & Kelembagaan;
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan
Konstruksi.

Pemimpin Umum :
Mahbullah Nurdin

Pemimpin Redaksi :
Hambali

Penyunting / Editor :
Maria Ulfah
Kristinawati Pratiwi Hadi

Redaksi Sekretariat :
Gigih Adikusomo
Budiasih Dyah Saraswati
Koko Gilang Nugroho
Anjar Pramularsih

Administrasi dan Distribusi :
Nanan Abidin
Sugeng Sunyoto
Agus Firngadi
Ahmad Suyaman
Ahmad Iqbal

Desain dan Tata Letak:
Nanang Supriyadi
Y. Bisma Wikantayasa

Fotografer :
Sri Bagus Herutomo

Alamat Redaksi :
Gd. Gedung Utama Lt. 10
Jl. Pattimura No.20 - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Tlp/Fax. 021-72797848
E-Mail : datinfo2006@yahoo.com

Salam dari redaksi

Tahun yang baru, langkah yang baru. Selamat berjumpa kembali pembaca buletin Badan Pembinaan Konstruksi yang kami hormati. Di awal tahun 2013 ini, kembali kami hadir membawa warta kepada segenap pemirsa sekalian, mengenai seluk beluk pembinaan jasa konstruksi di Indonesia.

Di awal tahun yang baru ini pula, terjadi perpindahan 'masinis kereta' di rangkaian gerbong kereta Badan Pembinaan Konstruksi. Menteri PU telah melantik pucuk pimpinan Badan Pembinaan Konstruksi yang sebelumnya dijabat Bambang Goeritno, digantikan oleh Hedyanto W. Husaini yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat. Selamat bertugas Pak Bambang di tempat yang baru, dan selamat datang pak Hedyanto !

Selain itu, Buletin BP Konstruksi perdana ini akan menampilkan beberapa tulisan menarik yang siap pembaca sekalian nikmati. Headline tulisan-tulisan tersebut antara lain mengenai Indonesia dan persiapannya mengikuti Pameran Bauma 2013 nanti, Peluang pelaku konstruksi Indonesia di Aljazair, mengawal Reformasi Birokrasi, Sistem Logistik Nasional, pentingnya pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK), dan seterusnya.

Akhirnya kami redaksi mengucapkan selamat menikmati dan selamat membaca ...

“Lokomotif suatu saat akan berganti. Menggantikan yang lama, diganti yang baru. Tapi satu yang pasti kereta akan tetap berjalan, harus berjalan. Membawa gerbong-gerbong harapan menyongsong pembaharuan sektor Konstruksi Indonesia”

Daftar Isi

▶ Memaknai Hakekat Pembentukan USBU & USTK LPJK	3
▶ Reformasi Birokrasi Kementerian PU	6
▶ Tantangan Menuju Jalan Hijau Indonesia	9
▶ Harmonisasi Sistem Logistik, Pembangunan Infrastruktur, dan Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi	11
▶ Hasil Rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional : Tim Pembina Jakons, harus Mawas Diri Terhadap Isu Terkini	13
▶ Indonesia dalam Pameran International BAUMA 2013	15
▶ Penandatanganan Kerjasama Pelatihan Operator Alat Berat PU Dengan AABI dan PT Rutraindo Perkasa	16
▶ Galeri Foto	17
▶ Pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) ke - 72 Di Jerudong, Brunei Darussalam	18
▶ Menyambut Peluang, Menjemput Kejayaan Pasar Konstruksi di Aljazair	21
▶ Pisah Sambut Kepala BP Konstruksi	23

MEMAKNAI HAKEKAT PEMBENTUKAN USBU & USTK LPJK

Oleh :

Ir. Ismono, MA *)

DR. Putut Marhayudi **)

B

erbagai upaya untuk meningkatkan pembinaan di sektor jasa konstruksi telah dilakukan oleh berbagai pihak, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota. Salah satu upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan pembinaan jasa konstruksi dilakukan melalui perubahan berbagai peraturan terkait jasa konstruksi yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan sektor konstruksi, guna mewujudkan tujuan yang diamanahkan oleh UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi yaitu mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, dan berdaya saing.

Pada Tahun 2010 pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengaturan terkait jasa konstruksi dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2010 juncto Peraturan Pemerintah nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi. Ada 4 substansi mendasar yang berubah dari peraturan tersebut yaitu: terkait kelembagaan, kesekretariatan lembaga, pembedangan usaha, dan sistim sertifikasi. Sesungguhnya nafas dari perubahan kebijakan tersebut adalah mengembalikan fungsi regulator kepada pemerintah, sedangkan eksekutornya adalah masyarakat jasa konstruksi yang terepresentasikan pada Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).

Ruang ini tidak cukup untuk membahas keseluruhan 4 substansi kebijakan perubahan tersebut, konsentrasi helicopter view diarahkan pada substansi perubahan yang terkait dengan sistim sertifikasi yang didalamnya terkait erat dengan pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) LPJK.

1. Apa itu USBU dan apa itu USTK?

USBU (Unit Sertifikasi Badan Usaha) dan USTK (Unit Sertifikasi Tenaga Kerja) merupakan unit yang dibentuk oleh lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) atau masyarakat jasa konstruksi. Pada tingkat Nasional lembaga membentuk USBU dan USTK Nasional, sedangkan pada tingkat Provinsi lembaga membentuk USBU dan USTK Provinsi, serta USTK bentukan masyarakat.



2. Apa Landasan Hukum Pembentukan USBU dan USTK?

Landasan hukum pembentukan USBU dan USTK mengacu pada:

- Pasal 28 a dan pasal 28 b Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2010 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi yang menyatakan dalam pelaksanaan tugas melakukan registrasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja Konstruksi, LPJK Nasional dan LPJK Provinsi membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit sertifikasi Tenaga Kerja.
- Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Unit Sertifikasi dan Pemberian Lisensi yang merupakan produk statuter dari Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2010 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

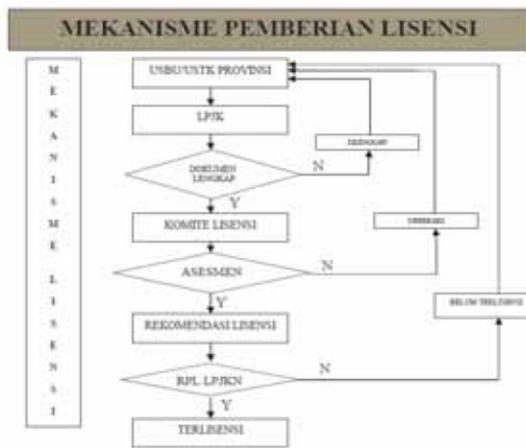
Mengacu pada Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum diatas, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) telah menyusun Peraturan Lembaga yang sifatnya operasional untuk membentuk USBU dan USTK tersebut dengan menerbitkan

- Peraturan LPJK no. 8 tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU).
- Peraturan LPJK no. 9 tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK).

3. Apa Alat Kelengkapan USBU dan USTK?

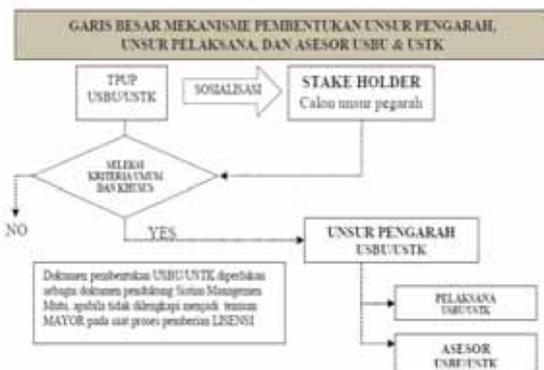
LPJK Nasional dan LPJK Provinsi dalam membentuk USBU & USTK harus memiliki alat kelengkapan yang terdiri atas Pengarah, Pelaksana dan Asesor yang mekanisme penetapannya sesuai dengan Peraturan LPJK nomor 8

tahun 2012 tentang pembentukan USBU dan Peraturan LPJK nomor 9 tahun 2012 tentang pembentukan USTK. Khusus pembentukan USBU dan USTK Provinsi di samping memiliki alat kelengkapan dimaksud juga harus mendapatkan lisensi dari LPJK Nasional sesuai dengan Peraturan LPJK nomor 7 tahun 2012 tentang Komite Lisensi Unit Sertifikasi dan Tata Cara Pemberian Lisensi.



4. Bagaimana Garis besar Mekanisme Pembentukan USBU & USTK?

Secara garis besar proses pembentukan USBU dan USTK diawali dengan penetapan Tim Pembentuk Unsur Pengarah (TPUP) oleh lembaga. TPUP memfasilitasi pembentukan sampai dengan penetapan unsur pengarah, yang pada akhirnya unsur pengarah membentuk unsur pelaksana dan menetapkan asesor, setelah melalui persetujuan pada Rapat Pengurus Lembaga (RPL) Proses pembentukan USBU dan USTK dapat dilihat pada bagan di bawah ini.



5. Apa Wewenang, Fungsi Dan Tugas USBU & USTK

USBU dan USTK memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi dan usaha orang perseorangan. Dalam menjalankan wewenangnya USBU & USTK memiliki fungsi mulai dari menerima berkas permohonan sampai dengan melakukan penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi. Dalam menjalankan fungsinya USBU & USTK memiliki tugas yang meliputi:

- (a) membantu tugas lembaga dalam melakukan tugas registrasi melalui penilaian klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja;
- (b) menerbitkan Berita acara kelayakan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha dan Tenaga Kerja.

6. Bagaimana Struktur organisasi Pelaksana USBU & USTK?

Dalam melaksanakan tugasnya USBU dan USTK, organisasinya dipimpin oleh Ketua yang dibantu oleh penanggungjawab bidang sebagaimana tertuang dalam



struktur organisasi di bawah ini. Mengingat tidak semua kondisi USBU dan USTK sama, maka digunakan struktur organisasi dengan pola minimal dan pola maksimal agar lebih efisien pelaksanaannya.

Sesungguhnya genderang pembentukan USBU & USTK oleh Lembaga memiliki filosofi yang positif dalam upaya mewujudkan tertib penyelenggaraan proses sertifikasi guna mendapatkan Badan Usaha yang memiliki kemampuan dan tenaga kerja yang memiliki kompetensi. Target pembentukan USBU dan USTK tingkat Nasional akan terbentuk paling lambat pada akhir Februari 2013, sedangkan target terbentuknya USBU dan USTK tingkat Provinsi di seluruh Indonesia akan terbentuk pada Juni 2013. Oleh karena itu dibutuhkan dukungan dan kepedulian dari semua stakeholders jasa konstruksi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Provinsi agar bersedia terlibat dalam pembentukan USBU dan USTK tersebut.

Rapat Koordinasi Nasional LPJK

Harapan akan dukungan dan kepedulian stakeholders tingkat Nasional maupun Provinsi mengenai pembentukan USBU dan USTK sepertinya bukan lagi sekadar harapan. Pada 20 Februari 2013 yang lalu, dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama oleh para pengurus LPJK dari 33 Provinsi, agar seluruh LPJK Provinsi segera membentuk Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) & Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK) tingkat Provinsi sesuai jadwal yang telah disepakati bersama.

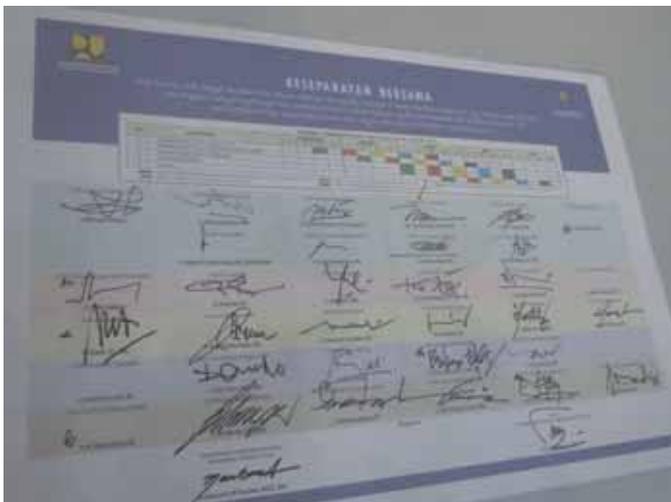
Penandatanganan tersebut dilaksanakan pada Rapat Koordinasi Nasional Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) Tahun 2013, Rabu (20/02) di Wisma Werdhapura, Sanur, Bali.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BP Konstruksi memberikan dorongan kepada LPJK baik Nasional maupun Provinsi untuk meningkatkan peran dalam pembinaan sektor Konstruksi di Indonesia.

“Proaktif, fokus, dan kompak adalah kunci untuk membina jasa konstruksi di Indonesia”, demikian disampaikan Hedyanto W. Husaini.

Proaktif berarti Pemerintah dan Lembaga cepat tanggap, turun ke lapangan untuk memberikan pelayanan prima kepada stakeholders. Sehingga tidak menunggu-nunggu ada komplain kemudian baru melayani. Sedangkan fokus dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang sudah diamanatkan oleh undang-undang dengan sepenuh tanggung jawab. Dalam hal ini LPJK diharapkan tidak hanya berkuat pada sertifikasi dan registrasi saja. Sedangkan kompak, dimaksudkan agar LPJK sebagai mitra Pemerintah menjaga koordinasi baik pusat maupun daerah, maupun antar asosiasi haruslah dijaga. Dengan demikian, sebagai badan publik, LPJK benar-benar mencurahkan tenaga dan waktu untuk melayani masyarakat jasa konstruksi.

Perlu untuk selalu diingat, bahwa Infrastruktur di Indonesia memegang peranan sangat penting. Baik kontribusinya dalam



pertumbuhan ekonomi hingga penyerapan tenaga kerja. Bahkan dalam MP3EI yang sedang digadag-gadag Pemerintah, hampir sebagian besar anggarannya ditujukan untuk konektivitas, atau dengan kata lain Infrastruktur untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lain.

“Dengan dana yang demikian besar dan volume pekerjaan yang tidak kalah massivenya, apakah kita siap menyediakan sumber daya manusianya?”, tutur Hedyanto. Jangan sampai kesempatan tersebut justru nantinya malah dinikmati oleh pelaku asing. Disinilah peran LPJK sangat dinantikan, untuk menyediakan sumber daya manusia konstruksi yang berkualitas.

Turut menandatangani kesepakatan bersama pembentukan USBU dan USTK tersebut Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Hedyanto W. Husaini dan Ketua LPJKN Tri Widjajanto serta disaksikan anggota Dewan Pengawas LPJKN Soeharsojo. Dengan demikian diharapkan layanan sertifikasi dan registrasi yang menjadi salah satu tugas LPJK dapat berjalan, dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat jasa konstruksi.***)

Penulis adalah *) Kepala Pusat PPUK BP. Konstruksi,
**) Kabid. Regulasi & Perijinan BP. Konstruksi
***) tw



REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Oleh : Lina Anggraeni

Reformasi Birokrasi Kementerian Pekerjaan Umum memiliki (2) dua pengertian yang harus kita pahami bersama agar dalam dalam pelaksanaannya memiliki arah yang sama. Pertama, Reformasi Birokrasi adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur dan sikap serta tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Kedua, Reformasi Birokrasi merupakan upaya mengubah birokrasi dari keadaan sekarang menjadi birokrasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Perlu kita ketahui bersama bahwa Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN) telah melaksanakan penilaian (*Desk Assessment*) atas Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian PU, dan dilaporkan melalui Surat Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi / Ketua UPRBN Nomor : B/2326/D.I.PAN-RB/09/2011 tanggal 30 September 2011, dengan hasil penilaian untuk Dokumen Usulan : 94 dan Road Map RB PU : 93 dari skala nilai 100.

Setelah dilakukan beberapa proses perbaikan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi akhirnya diperoleh hasil Penilaian Kesiapan RB PU yang disampaikan melalui Surat Menteri PAN&RB Nomor B/2924/M.PAN-RB/10/2012 tanggal 19 Oktober 2012, dengan nilai 64 (dengan range skor 61-70 masuk kategori Level 3), sehingga besaran Tunjangan Kinerja diusulkan sekitar 55% dari Kementerian Keuangan. Hal ini tidak serta merta kita terima begitu saja karena masih ada pengumpulan data dukung yang diperlukan dalam penghitungan kebutuhan Anggaran Tunjangan Kinerja

yang terdiri atas rekapitulasi hasil pemeringkatan jabatan (*job grading*) yaitu jumlah pegawai di masing-masing grade, take home pay terendah dan tertinggi saat ini di masing-masing grade, daftar nama-nama tim pelaksana kegiatan, dasar hukum beserta alokasi anggaran untuk pembayaran honorarium tim tersebut serta daftar jenis tunjangan /insentif yang diterima perbulan selain tunjangan yang melekat pada gaji pokok sepanjang tahun beserta dasar hukumnya.

Hal tersebut diatas cukup memusingkan bagi kita dalam awal persiapannya sehingga kadang membuat pesimis apakah kita mampu mengejar target pengumpulan dokumen serta konsekuensi yang harus dilaksanakan setelah penerimaan tunjangan kinerja nanti? Berat memang! Karena sebagian dari kita masih memiliki sikap mental 'birokrasi lama' dan saat ini tidak perlu kita jelaskan lebih lanjut. Namun sebagai generasi muda kita harus bangkit dan mampu menjadi Agen Perubahan, mari

kita laksanakan apa yang telah dicanangkan Pemerintah dalam menjawab tuntutan jaman yang merupakan 'Hijrah Moral' dan menjadi tanggung jawab birokrat.

Berbicara masalah Reformasi Birokrasi akan berkaitan dengan tunjangan kinerja. Tunjangan Kinerja merupakan reward atau penghargaan sekaligus punishment atau hukuman dari kinerja yang kita hasilkan secara optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, yang disebut dengan *Performance Management*. Di sinilah perlunya kerjasama pemimpin dan anak buah didalam pencapaian target-target kinerja untuk kurun waktu yang telah ditentukan (merujuk lampiran Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 63 Tahun 2011). Tunjangan kinerja diberikan berdasarkan kinerja yang telah dicapai oleh seseorang individu pegawai. Kinerja individu pegawai harus sejalan dengan kinerja yang hendak dicapai oleh instansi. Oleh karena itu, tunjangan kinerja individu pegawai dapat



meningkat atau menurun sejalan dengan peningkatan atau penurunan kinerja yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Instansi.

Pengelolaan kinerja menjadi sangat penting dan merupakan kompetensi yang mutlak harus dimiliki oleh setiap pegawai karena mengkorelasikan tunjangan kinerja dengan performance appraisal individu. Pemberian tunjangan kinerja diberikan apabila pegawai dapat mempertahankan kinerjanya dengan nilai paling rendah adalah Baik (B), penambahan tunjangan kinerja diberikan apabila mendapat nilai kinerja pada tahun berjalan adalah Sangat Baik (A) sedangkan pengurangan tunjangan kinerja diberikan apabila pegawai mendapat penilaian kinerja pada tahun berjalan dibawah nilai Baik (Cukup, Kurang, Buruk). Namun pelaksanaan pemberian tunjangan kinerja akan diatur lebih lanjut dalam peraturan instansi masing-masing.

Sasaran jangka pendek / target Reformasi Birokrasi Kementerian PU sampai dengan tahun 2014 adalah Meningkatkan Disiplin Pegawai dan Tumbuhnya Kesadaran Untuk Melayani Publik serta Kesiapan Dinilai Kinerja masing-masing individu. Bukan tanpa alasan mengapa ketiga sasaran tersebut menjadi prioritas utama Kementerian PU dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Meningkatnya Disiplin Pegawai.

Kinerja pegawai itu sendiri di dalamnya sangat dipengaruhi oleh perilaku pegawai, yang mana dalam hal ini lebih ke masalah kedisiplinan. Menurut Moekijat (2005) "Disiplin adalah kesanggupan menguasai diri yang diatur". Disiplin menitikberatkan pada bantuan kepada pegawai untuk mengembangkan sikap yang baik terhadap pekerjaan. Disiplin pegawai yang baik akan mempercepat tercapainya tujuan organisasi, sedangkan disiplin yang rendah akan menjadi penghalang dan memperlambat pencapaian tujuan organisasi. Seorang pegawai dapat dikatakan memiliki disiplin kerja yang

baik apabila menunjukkan sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya (Siswanto, 2006). Disiplin kerja dibutuhkan untuk menjaga agar prestasi kerja pegawai meningkat.

Sebagai tindak lanjut sasaran Reformasi Birokrasi ini, Badan Pembinaan Konstruksi melalui Surat Perintah Kepala Badan Pembinaan Konstruksi nomor. 393/Sprin/KK/2012 tanggal 17 Desember 2012 menginstruksikan kepada para Pejabat Eselon II agar dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan unit eselon II harus dilakukan melalui peningkatan disiplin pegawai, penerapan budaya organisasi dan peningkatan kinerja pegawai. Salah satu bentuk disiplin pegawai adalah melalui kehadirannya di kantor. Untuk tahap pertama (triwulan I), dihimbau untuk menyiapkan sistem dalam bentuk finger print dan melaksanakan peningkatan disiplin pegawai. Setiap unit kerja Eselon II sudah harus melaporkan absensi finger print tersebut dalam bentuk hard copy setiap minggu pertama bulan berikutnya ditujukan ke Sekretaris BP Konstruksi, sehingga diharapkan Sekretaris BP Konstruksi dapat memantau pelaksanaan peningkatan disiplin di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi.

Tumbuhnya Kesadaran Untuk Melayani Publik. Sesungguhnya yang menjadi produk dari organisasi pemerintahan adalah pelayanan masyarakat (public service). Pelayanan tersebut diberikan untuk memenuhi hak masyarakat, baik



itu merupakan layanan sipil maupun layanan publik. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi), dan dilakukan secara universal. Tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, menurut Thoah (1995:4) bahwa tugas pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik.

Max Weber (1864-1920), seorang sosiolog, filsuf, dan ahli ilmu politik dan ekonomi berkebangsaan Jerman mengatakan bahwa birokratisasi adalah cara yang paling efisien dan rasional dalam pengorganisasian. Sejatinya, Birokrasi adalah sebuah konsep yang bagus. Tapi sayangnya, implementasinya di republik kita tercinta ini masih jauh dari harapan. Aturannya manis, tapi implementasinya belum tentu baik, namun demikian akan lebih baik jika kita mencoba memperbaiki yang telah ada.

Saat ini Kementerian Pekerjaan Umum telah menetapkan seluruh Standar Pelayanan dan telah menerapkan 60% Standar Pelayanan Kementerian PU dengan hasil cukup. Hal ini merupakan hasil kerja keras seluruh pegawai Kementerian PU dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam *Quick Win* Kementerian PU yaitu:

1. Penerapan pelayanan preservasi jalan terukur dengan target kinerja layanan penambalan lubang jalan paling lama 5 hari di ruas jalan nasional non tol Cikampek-Semarang jalur pantura Jawa.
2. Peningkatan pulsa atau pelayanan untuk laboratorium, sertifikasi, dan advis teknik.
3. Peningkatan operasionalisasi wilayah bebas korupsi pada "pemilihan pengadaan barang dan jasa kementerian PU di pulau Jawa".

Badan Pembinaan Konstruksi memiliki pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan jasa konstruksi nasional yang

berdaya saing dan mampu menyelenggarakan konstruksi yang lebih efisien dan efektif.

Perkuatan Badan Pembinaan Konstruksi ke depan sangat dibutuhkan untuk pengelolaan sektor konstruksi yang efisien dan efektif dalam rangka menunjang perekonomian nasional. Oleh karena itu, transformasi Badan Pembinaan Konstruksi juga sangat dibutuhkan. Berikut ini beberapa konsep bagi landasan transformasi Badan Pembinaan Konstruksi.

1. Badan Pembinaan Konstruksi diharapkan tidak hanya berada pada domain jasa konstruksi tetapi industri konstruksi dan perusahaan konstruksi baik di ranah pekerjaan umum maupun non-pekerjaan umum. Lembaga ini akan menjadi pengatur, pemberdaya dan pengawas sektor konstruksi.
2. Badan Pembinaan Konstruksi diharapkan dapat menjadi koordinator bagi pengelolaan sektor konstruksi di Indonesia. Badan Pembinaan Konstruksi akan bertugas untuk mewujudkan nilai tambah konstruksi bagi pembangunan nasional. Bisnis utama lembaga ini adalah mengelola sektor konstruksi pada aspek-aspek regulasi termasuk mengembangkan NSPK (Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria) serta membina sektor konstruksi agar mampu menciptakan nilai tambah bagi pembangunan nasional dan mewujudkan the finest built environment.

Kesediaan Dinilai Kinerja Masing-Masing Individu.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sesuai arahan Menteri PAN dan RB bahwa terbitnya PP ini sebagai acuan untuk menilai kinerja PNS secara jelas, dan ada kriterianya, sehingga dapat meningkatkan prestasi dan kinerja PNS. PP ini mensyaratkan setiap PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan

instansi. Sasaran Kerja Pegawai itu memuat kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin PNS.

Kementerian Pekerjaan Umum telah mulai mensosialisasikan Sasaran Kerja Pegawai ini sejak tahun 2011 dan latihan pengisiannya sejak tahun 2012, mulai dari tingkat atas atau Eselon I sampai staf. Tidak mudah untuk mengenalkan SKP ini karena sebagian besar pegawai telah terbiasa dengan DP3. Hal ini ditindaklanjuti oleh setiap unit kerja untuk mensosialisasikan ke unit yang lebih kecil dan dengan kerjasama yang baik terutama dengan Biro Kepegawaian dan Orta Sekretariat Jenderal PU dapat dikatakan saat ini sebagian besar pegawai telah paham cara pengisian Sasaran Kerja Pegawai. Di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, SKP telah mulai diperkenalkan sejak tahun 2012, dan secara intensif disosialisasikan pada awal tahun 2013 demi memantapkan pelaksanaan penilaian tahun 2014 mendatang.

Melalui sistem penilaian yang sempurna, diharapkan apa yang menjadi tujuan dari penilaian itu sendiri bisa tercapai secara efektif, sehingga bisa dihasilkan aparatur negara yang baik dan seimbang lahir maupun batinnya, yang ditandai dengan adanya tingkat kompetensi yang tinggi dan perilaku yang mencerminkan seorang abdi negara, dan abdi masyarakat. Adanya perilaku yang baik dan tingkat kompetensi yang tinggi pada masing-masing individu, secara langsung juga akan meningkatkan kompetensi organisasi atau instansi dimana pegawai tersebut mengabdikan.

Untuk mewujudkan akuntabilitas publik atau akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar dapat berjalan sesuai yang diinginkan dan dicita-citakan bersama, harus disertai dengan upaya mewujudkan akuntabilitas perilaku/tingkah laku baik personal (*behavior*) dan wajib dilakukan oleh

setiap entitas (institusi/organisasi) terhadap personalnya.

Ketiga sasaran jangka pendek Reformasi Birokrasi Kementerian PU (s.d 2014) ini yang akan dioptimalkan oleh Badan Pembinaan Konstruksi, diharapkan mampu mewujudkan tujuan yang akan dicapai. Hanya semangat untuk berubah yang mampu digunakan sebagai pendorong kita untuk melakukan suatu perubahan. Semangat untuk menjadi orang Pekerjaan Umum bukan sekedar pegawai Pekerjaan Umum.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan BP Konstruksi bagi lingkungan internal BP Konstruksi dan lingkungan eksternal, saat ini telah disusun suatu konsep nilai-nilai strategis (*strategic value*) yang disebut "Bersama KITA Membangun". Penjelasan lebih lanjut dari nilai-nilai strategis di atas dijabarkan sebagai berikut.

KEKOMPAKAN atau KEBERSAMAAN, mengandung pengertian rasa persatuan atau kekompakan yang ada di dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu ataupun sesama bagian yang mampu mendukung terciptanya komunikasi dan kerjasama yang baik. Konsep "KITA" tersebut berupa singkatan dari Kompetensi, Integritas, Transparansi, dan Akuntabilitas. MEMBANGUN (KONSTRUKTIF), mengandung pengertian masa depan yang lebih baik. Di samping itu, membangun juga secara implisit mengandung pengertian berkelanjutan (*sustainability*) yang didefinisikan sebagai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang dalam konteks ekonomi, sosial dan lingkungan.

Penulis adalah Kasubag Orta Sekretariat Badan Pembinaan Konstruksi



Tantangan Menuju Jalan Hijau Indonesia

Sektor transportasi berkontribusi hingga 30% terhadap total emisi karbon di dunia (Kementerian Perhubungan dan Boston Consulting Group, 2012). Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa transportasi merupakan penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar di DKI Jakarta, yakni mencapai 47%. Sehingga dalam Perpres No. 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), transportasi dan energi ditempatkan dalam urutan ketiga yang harus dikurangi emisinya. Beberapa negara telah menerapkan kebijakan keberlanjutan di sektor jalan. Seperti negara Uni Eropa yang telah menyusun *New Road Construction Concepts* (NR2C) yang bertujuan untuk menuju implementasi infrastruktur di Eropa yang *reliable, green, safe&smart*, serta *humanis*. *University of Washington* dan *Greenroads Foundation* di Amerika juga telah mengeluarkan *Greenroads Rating System*. Bagaimana dengan Indonesia?

Sepintas tentang Jalan Hijau

Menurut *Guidelines for the Green Road Project* (Kementerian Lingkungan

Korea), jalan hijau (*Green Road*) didefinisikan sebagai jaringan ekologis yang didesain untuk mengkonservasi dan merehabilitasi *green belt* dan kondisi ekosistem, dengan tujuan memperbaiki dan memperbarui ekosistem untuk mendukung sistem kehidupan disekitarnya. Konsep *Green Road* di sini meliputi tahapan pembiayaan, perencanaan, desain, konstruksi, dan pengelolaan jalan.

Lebih lanjut, Forum Komunikasi Institusi Penelitian Jalan Kawasan Eropa (FEHRL/*Forum of European Highway Research Laboratory*) yang terdiri dari 28 negara

di Eropa, Israel, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat menyusun suatu konsep jalan untuk kawasan Eropa hingga tahun 2040 yang disebut dengan NR2C (*New Road Construction Concepts*). Konsep jalan ini terdiri atas 4 tahapan yang lebih maju, dimana yang dimaksud dengan tahap infrastruktur hijau adalah infrastruktur jalan yang didesain harmonis dengan lingkungan sekitar dengan meminimalkan konsumsi energi dan dampak lalu lintas terhadap lingkungan, mengendalikan emisi, serta mengoptimasi penggunaan material buatan untuk mengurangi penggunaan sumber daya alam.

Construction Concepts	Characteristics	Directions for Solutions
Reliable Infrastructure	Available Durable Reliable	<ul style="list-style-type: none"> • Lifetime engineering • Fast, hindrance-free maintenance • Balancing demand and capacity • Asset management tools
Green Infrastructure	Energy Efficient Sustainable Environment	<ul style="list-style-type: none"> • Saving natural resources • Emission control
Safe & Smart Infrastructure	Accessible Smart Safe	<ul style="list-style-type: none"> • Safe design • Smart design • Smart communication • Smart monitoring
Human Infrastructure	Multi-functional Multi usable Public security	<ul style="list-style-type: none"> • Public security • Multi-functional use • Human design

Sumber: fehrl.org/nr2c

Tantangan Jalan Hijau Indonesia

Kebijakan jalan dan jembatan di Indonesia pada dasarnya telah memuat unsur-unsur keberlanjutan, meskipun belum komprehensif. Antara lain dengan mengacu kepada konsepsi pembangunan berkelanjutan, *Millenium Development Goals*, dan Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-MAPI).

Hal ini, di antaranya dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pasal 2 yang mengatur bahwa "Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan kemitraan". Serta pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat".

Peraturan Menteri PU No. 19/PRT/M/2011 yang mengatur mengenai Persyaratan dan Perencanaan Teknis Jalan pun telah menyebutkan bahwa pembangunan jalan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, di antaranya dengan melengkapi setiap perencanaan teknis jalan dengan dokumen AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 59). Beberapa kebijakan lainnya yang mengatur mengenai pembangunan jalan yang berwawasan lingkungan yaitu:

- Peraturan Menteri PU No. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang PU yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.
- Peraturan Menteri PU No. 05/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penanaman Pohon pada Sistem Jaringan Jalan.
- Keputusan Dirjen Bina Marga No. 08, 09, 10 dan 11 Tahun 2009

tentang Pedoman Umum, Pedoman Perencanaan, Pedoman Pelaksanaan dan Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan & Jembatan.

Kebijakan-kebijakan tersebut belum secara jelas dan spesifik mengatur mengenai jalan hijau. Mengingat pentingnya antisipasi pemanasan global dan perubahan iklim serta kondisi lingkungan strategis yang ada, maka pada tahun 2012 Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi bersama dengan Direktorat Bina Teknik Ditjen Bina Marga dan Puslitbang Jalan dan Jembatan telah mengadakan serangkaian diskusi awal yang membahas mengenai pewujudan jalan hijau di Indonesia dari beberapa aspek.

Dari hasil diskusi ini, diketahui bahwa terdapat beberapa kendala atau tantangan dalam implementasi jalan hijau di Indonesia. Instrumen kebijakan komprehensif jalan hijau yang meliputi Norma, Standar, Pedoman dan Manual/Kriteria belum lengkap. Hal ini tentu saja merupakan tantangan utama karena kebijakan selain berperan sebagai koridor juga dapat berfungsi sebagai stimulan bagi terwujudnya jalan hijau. Di samping itu, dengan adanya kebijakan berupa norma diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem nilai bagi terselenggaranya jalan hijau di Indonesia. Kebijakan di sini tentu saja akan efektif bila mana mencakup *reward and punishment*.

Belum banyaknya SDM yang memiliki kompetensi di bidang jalan hijau merupakan tantangan tersendiri. Sangat diperlukan SDM yang menguasai

penyelenggaraan jalan hijau baik dari aspek teknis, manajerial maupun administratif. Hal ini tentu saja berkaitan dengan atribut keahlian yang mengikutinya, seperti keberadaan asosiasi profesinya dan SKKNI.

SDM yang berkompeten saja belum lah cukup. Peran dan pemikiran SDM ini akan dapat optimal manakala didukung dengan adanya Pokja atau Kelembagaan efektif yang unsurnya terdiri dari para pemangku kepentingan bidang jalan yang memiliki kesamaan persepsi dan komitmen tinggi terhadap pewujudan jalan hijau di Indonesia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kemajuan dan keandalan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, melalui pengembangan pengetahuan dan teknologi, penerapan berbagai inovasi yang terkait dengan jalan hijau akan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Pengembangan dan penyebaran IPTEK jalan hijau akan dapat optimal manakala didukung oleh keberadaan suatu sistem informasi.

Demikian, masih banyak "PR" yang harus digarap untuk mewujudkan jalan hijau di Indonesia, antara lain yaitu: adanya arah kebijakan yang jelas, landasan hukum yang kuat, kelembagaan yang efektif, mekanisme operasional yang mampu mawadahi berbagai pemangku kepentingan, serta piranti pendukung operasional yang jelas. Hal-hal tersebut menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi kita untuk dapat mewujudkan jalan hijau di Indonesia.

Kontributor: Nugroho Wuritomo



HARMONISASI SISTEM LOGISTIK NASIONAL, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, DAN RANTAI PASOK MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Oleh: Bustanul Arifin



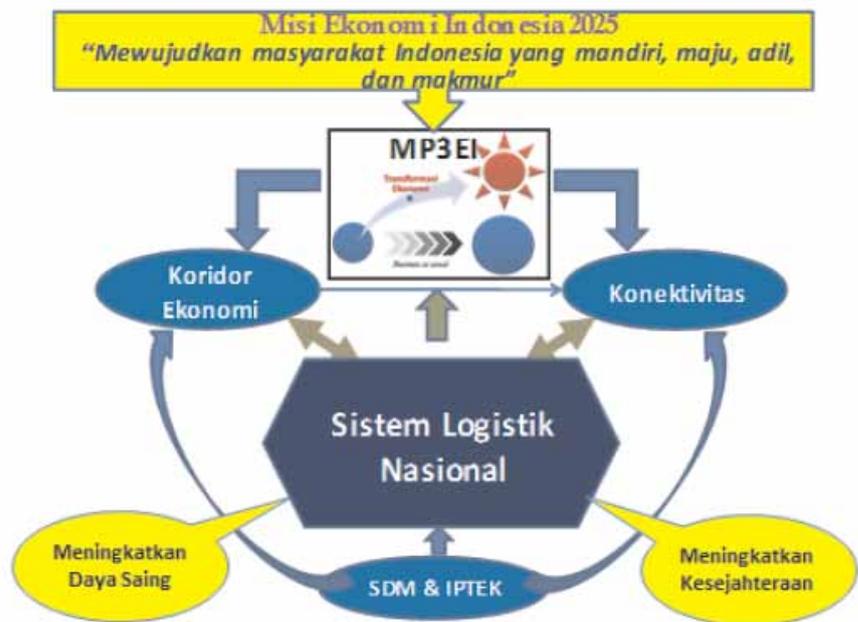
Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar di dunia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, serta letak geografis yang sangat strategis dalam jalur pelayaran utama dunia (selat Malaka). Meskipun demikian, tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak lebih baik dari beberapa Negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam, dan beberapa Negara ASEAN lainnya, yang potensi sumber daya alamnya tidak lebih besar dari Indonesia. Sementara itu, perkembangan global telah membuat komunitas Negara ASEAN sepakat untuk mengimplementasikan komunitas ekonomi ASEAN (pasar bebas ASEAN) serta *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA) pada tahun 2015 yang akan datang. Perkembangan kebijakan global/regional tersebut mengharuskan Indonesia untuk segera melakukan beberapa pembenahan agar Indonesia siap bersaing dengan Negara-negara ASEAN lainnya, sehingga Indonesia dapat mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut.

Peringkat daya saing global (*Global Competitiveness Index/GCI*) Indonesia sendiri selama periode 2012-2013 kembali mengalami penurunan, yaitu berada pada posisi 50 dari 144 negara. Padahal pada periode 2011-2012 Indonesia berada pada peringkat 46 dari 142 negara, dan pada periode 2010-2011 pada peringkat 44 dari 139 negara. Rendahnya daya saing produk-produk Indonesia salah satunya disebabkan oleh permasalahan kinerja logistik yang belum optimal, sehingga menyebabkan tingginya biaya logistic dan lamanya waktu kirim. Menurut



data Bank Dunia, pada tahun 2012 posisi *Logistic Performance Index* (LPI) Indonesia berada di peringkat 59, berada di bawah Singapura (1), Malaysia (29), Thailand (38), dan Filipina (52). Menyadari hal tersebut, pemerintah kemudian menyusun beberapa upaya

dalam rangka perbaikan dan integrasi *system logistic* nasional, yaitu dengan diterbitkannya Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang “Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (Sislognas)”, sebagai salah satu prasarana dalam membangun daya saing nasional serta mendukung Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mencapai Indonesia sejahtera pada tahun 2025. Cetak biru ini diharapkan dapat menjadi panduan atau pedoman bagi pemangku kepentingan terkait dalam bentuk Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional di bidang tugas masing-masing, yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis masing-masing Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian dan Pemerintah daerah sebagai bagian dari dokumen perencanaan pembangunan.



Gambar 1. Peran Sislognas Dalam MP3EI

Upaya pengembangan Sislognas dan Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) yang efektif, efisien dan terintegrasi tersebut memerlukan pembangunan infrastruktur logistik yang dapat menunjang konektivitas lokal, nasional, regional, dan global. Ketersediaan infrastruktur logistic diyakini menjadi salah satu dari enam penggerak utama sislognas di samping lima penggerak utama lainnya, yaitu: komoditas utama; pelaku dan penyedia jasa; sumber daya manusia logistik; teknologi informasi dan komunikasi; dan harmonisasi regulasi.

Berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan infrastruktur telah sering kali kita temui, terutama terkait dengan rantai pasok material dan peralatan konstruksi (MPK) dan sistem logistik MPK di Indonesia yang tidak efisien. Persoalan rantai pasok konstruksi yang tidak efisien telah mengakibatkan biaya yang tinggi bagi sektor pemerintah dan swasta. Selain itu, adanya hambatan (*bottlenecking*) sistem logistik MPK dan ketidakharmonisan regulasi yang ada, ditengarai penyebab utama terjadinya kelangkaan dan disparitas harga, sehingga menyebabkan terhambatnya laju pembangunan infrastuktur di berbagai wilayah, terutama untuk wilayah Indonesia timur. Untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang efektif dan efisien, diperlukan dukungan sistem rantai pasok MPK yang efisien dan terintegrasi. Sementara itu, upaya peningkatan efisiensi sumber daya (SD) konstruksi sendiri, khususnya terkait dengan pasokan MPK, memerlukan dukungan Sislognas, dan Sistranas yang efektif, efisien dan terintegrasi (Nur Bahagia, Buku Konstruksi Indonesia 2012). Hubungan yang erat antara Sislognas Rantai Pasok MPK Pembangunan Infrastruktur ini membentuk suatu *causal Loop* yang memiliki saling ketergantungan yang besar antara satu dengan lainnya.

Kondisi saling ketergantungan tersebut pada akhirnya melahirkan keyakinan bahwa pengembangan Sislognas perlu didahului dengan peningkatan



pembangunan infrastruktur. Dalam hal ini pemerintah telah mengalokasikan dana yang sangat besar pada sektor infrastruktur, baik melalui program RPJMN maupun MP3EI. Seiring dengan semakin meningkatnya pembangunan infrastruktur tersebut, maka pengelolaan Rantai pasok konstruksi yang efektif dan efisien merupakan kunci dalam pembangunan infrastruktur, sekaligus merupakan kunci dalam keberhasilan program Sistem Logistik Nasional.

Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi Rantai Pasok MPK, antara lain: adanya *Integrated planning and control*

dari hulu hingga hilir, dan adanya *single point of responsibility* dalam pengelolaannya; tersedianya sistem informasi dengan mengacu pada kerangka *e-Supply Chain Management (e-SCM)* berbasis web; serta terwujudnya harmonisasi kerjasama yang baik diantara seluruh *stakeholder*. Dengan terkelolanya sistem rantai pasok MPK diharapkan dapat tercapai suatu kondisi terpenuhinya MPK bagi penyelenggaraan konstruksi yang tercermin dari tersedianya MPK yang mencukupi baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya, secara efektif dan efisien serta terwujudnya kemandirian bagi industri konstruksi nasional.



Gambar 2. Hubungan yang erat antara Sislognas Rantai Pasok MPK Pembangunan Infrastruktur

HASIL RAPAT TIM PEMBINA JASA KONSTRUKSI NASIONAL : "Tim Pembina Jakons, harus Mawas Diri Terhadap Isu Terkini"



Kita ketahui bersama, saat ini Industri Jasa Konstruksi mendapat sorotan banyak pihak di berbagai negara, mengingat sumbangsuhnya yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Dari data BPS di tahun 2011, Sektor konstruksi menyumbang 10,2 % terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Sedangkan penyerapan tenaga kerja di sektor konstruksi hingga 2011, mencapai enam juta lebih dari keseluruhan sekitar 109 juta tenaga kerja di Indonesia.

Dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2014 ditargetkan minimal 7 %, suatu pencapaian yang harus didukung oleh Infrastruktur yang baik dan terkait pekerjaan fisik konstruksi maupun dari sisi sumber daya manusia konstruksi.

"Kita lihat pertumbuhan *manufacture* hingga menyumbang GDP Nasional tertinggi tahun lalu tidak lain karena dukungan Infrastruktur", ujar Hermanto Dardak.

Di samping kebutuhan memperkuat struktur sektor konstruksi, satu hal yang patut menjadi perhatian adalah agar setiap sektor saling mendukung untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pembangunan pada umumnya. Untuk mendukung hal tersebut, sudah saatnya diwujudkan suatu sistem yang terintegrasi antara material, peralatan, dan transportasi yang memudahkan

Industri di Indonesia baru-baru ini diguncang dengan isu kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), serta tuntutan penghapusan sistem *Outsourcing* yang dianggap tidak memenuhi hak asasi manusia sebagai salah satu sumber daya produksi aktif. Tidak bisa dipungkiri tekanan tersebut merupakan sebuah keniscayaan, mengingat semakin meningkatnya kebutuhan kaum pekerja yang belum diiringi dengan kepastian jaminan ekonomi.

Namun bagaimana reaksi industri, terutama industri konstruksi menanggapi isu-isu tersebut? Standar UMR yang baru, tentunya berpengaruh terhadap industri konstruksi. Apalagi tuntutan semua pekerja menjadi pegawai tetap, akan mempengaruhi semangat para kontraktor. Mengingat pekerjaan konstruksi cenderung tidak tetap, tergantung proyek.

Isu-isu tersebut hanya sebagian dari sekian banyak permasalahan yang harus diketahui dan dihadapi oleh pelaku jasa konstruksi Nasional. Oleh karena itu Tim Pembina Jasa Konstruksi sangat dibutuhkan, untuk memetakan perkembangan yang terjadi dan

mungkin berpengaruh terhadap sektor konstruksi, yang kemudian disampaikan kepada masyarakat jasa konstruksi di seluruh pelosok Nusantara.

Pernyataan yang disampaikan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak pada forum Rapat Koordinasi Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional (TPJKN) Tahun Anggaran 2012, beberapa waktu lalu tersebut memang benar. Mengingat perkuatan industri konstruksi Indonesia adalah wajib adanya, dengan harapan menemukan solusi berbagai permasalahan, sehingga sektor ini dapat terus tumbuh dan berkembang.





transfer kesemua faktor tersebut. Sebab tanpa adanya integrasi yang apik, mustahil pembangunan Infrastruktur dapat terlaksana, hingga ke pelosok penjuru nusantara.

Untuk itulah, menurut Wamen PU, TPJKN perlu membuat peta kebutuhan dan aksi nyata yang harus dilaksanakan sesuai kondisi masing-masing daerah. Minimal, dikatakan Hermanto Dardak, peta tersebut dapat menyesuaikan dengan rencana MP3EI. Sementara itu faktor dari luar juga jangan sampai luput dari perhatian TPJKN. Kita ketahui saat ini 'center of gravity' dunia tertuju pada Asia, di saat ekonomi Eropa dan Amerika justru malah mengalami

goncangan. Indonesia harus bersiap, tidak terkecuali sektor konstruksinya. Hingga saatnya pelaku asing menyerbu masuk, Indonesia tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri.

Tak hanya itu Tim Pembina Jasa Konstruksi Nasional juga harus siap menjadi penyambung lidah akan informasi-informasi terbaru yang perlu segera disampaikan kepada masyarakat konstruksi di daerah. Baik informasi berupa kebijakan dari Pemerintah maupun informasi dari dunia konstruksi terbaru, dalam dan luar negeri. Dengan demikian pelaku konstruksi di Indonesia akan selalu update dengan situasi terkini dan bersiap dengan sepenuh

kemampuan diri.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno menyampaikan mengenai fenomena kecilnya marjin keuntungan yang didapatkan BUMN Indonesia bila dibandingkan dengan aset dan modalnya yang tidak kecil. "Bahkan BUMN konstruksi Nasional rata-rata hanya memperoleh 2,5 s.d. 4% keuntungan", ungkap Bambang Goeritno. Satu hal yang perlu diteliti lebih lanjut oleh TPJKN, agar jangan sampai hal tersebut menjadi salah satu penyebab banting-bantingan harga di kalangan penyedia jasa.

Pada forum Rakor tersebut, beberapa agenda penting yang disampaikan antara lain : Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Jasa Konstruksi dan Lembaga yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan Ismono, Kebutuhan akan tenaga ahli *Quantity Surveyor* di Indonesia yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi Tri Djoko Waluyo, *Dispute Board* sebuah alternatif penyelesaian sengketa yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum Sarwono Hardjomuljadi, dan Agenda percepatan Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi yang disampaikan oleh Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, Panani Kesai. * (tw)



Indonesia dalam Pameran Internasional BAUMA 2013

Oleh: Gigih Adikusuma

"The Peak of Excellence BAUMA 2013" pada tanggal 15 -21 April 2013, yang diadakan di Munich, Jerman merupakan acara Pameran Internasional terbesar yang ke-30 yang meliputi sektor Konstruksi dan Pertambangan.

Pada tahun ini Indonesia dipilih sebagai *Partner Country* BAUMA. Keikutsertaan Pemerintah Indonesia dalam BAUMA 2013 diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas kepada investor mengenai peluang investasi di Indonesia. Pada Pameran kali ini BAUMA akan fokus pada pertumbuhan pasar di Indonesia. Berkat investasi infrastruktur yang telah direncanakan yaitu senilai US \$ 465 miliar antara tahun sekarang dan 2025, Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang memiliki banyak potensi peluang bisnis dan investasi. Sebagai pameran perdagangan internasional terkemuka yang ke-30 BAUMA akan menyajikan berbagai pameran yang benar-benar komprehensif kepada para pengunjung. Cabang-cabang industri yang hadir adalah mesin konstruksi, alat berat konstruksi bangunan, alat-alat berat pertambangan, kendaraan konstruksi dan peralatan konstruksi. Adapun Delegasi RI yang akan mengikuti kegiatan tersebut adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku koordinator, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bappenas, Kementerian Perhubungan, PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), serta asosiasi dan pelaku usaha konstruksi dan pertambangan.

Agenda Utama Pameran BAUMA 2013 di Munich :

- a. 14 April 2013 (sore) : Pembukaan (Direncanakan untuk dihadiri oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Pekerjaan Umum)
- b. 15 - 21 April 2013 : Pameran dan Temu Bisnis
- c. 17 April 2013 : Indonesia Day (One Day Seminar)

Misi Indonesia di dalam BAUMA 2013 adalah :

- Mempromosikan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia saat ini sedang melakukan pembangunan ekonomi secara intensif serta merupakan tujuan investasi yang menarik dan prospektif;
- Menjadikan BAUMA 2013 sebagai platform yang kuat untuk mengembangkan dan memperkuat jejaring bisnis antara perusahaan Indonesia dan perusahaan Internasional;
- Menggalang investasi di bidang infrastruktur serta industri material dan peralatan konstruksi (MPK) serta pertambangan (mining).

Adapun substansi yang akan ditampilkan oleh Indonesia dalam BAUMA 2013 meliputi pemaparan mengenai iklim investasi di Indonesia, peluang investasi infrastruktur, peluang investasi di bidang pertambangan, serta peluang investasi industri material dan peralatan konstruksi dan pertambangan.

Sebagai *Partner Country*, Indonesia mendapatkan fasilitas dan keuntungan tersendiri. BAUMA menyediakan beberapa *event* untuk mendukung peluang investasi infrastruktur di Indonesia di antaranya :



1. Indonesia Day di FORUM BAUMA

Pada tanggal 17 April sebuah seminar sehari penuh pada sektor infrastruktur dan pertambangan akan dilakukan di aula C2 yang menampilkan pembicara dari instansi pemerintah dan pelaku usaha konstruksi dan pertambangan Indonesia serta testimoni dari pelaku usaha Jerman di Indonesia. Kegiatan Pameran BAUMA 2013 ini terdiri dari Pameran dan Indonesia Day. Dalam kesempatan Indonesia Day ini, akan ada speech dari Kementerian PU yang rencananya akan disampaikan oleh Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit M.Sc.

2. Indonesia Business Lounge

Acara yang akan dimanfaatkan untuk temu bisnis dan "*market sounding*" peluang investasi di Indonesia. Di dalamnya para pengunjung dapat melakukan pertukaran informasi dan jaringan yang disponsori oleh Federasi Teknik Jerman (VDMA) dan BAUMA, acara ini akan memberikan semua peserta lingkungan yang sempurna dimana mereka dapat mendiskusikan proyek dan mengembangkan ide-ide bisnis baru bersama-sama. Luas area untuk Indonesia Business Lounge seluas 580 m2.

Indonesia juga akan mendapatkan Pavilion/Booth seluas 69 m2 yang akan dimanfaatkan bersama. Pada acara Indonesia Business Lounge akan dimanfaatkan dari pihak Indonesia secara maksimal dengan menjadwalkan pertemuan khusus untuk "*market sounding*" kepada investor potensial oleh masing masing sektor. Melalui event ini diharapkan Indonesia dapat menarik investor sebanyak-banyaknya untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan investasi infrastruktur di Indonesia.



PENANDATANGAN KERJASAMA PELATIHAN OPERATOR ALAT BERAT PU DENGAN AABI DAN PT. RUTRAINDO PERKASA



Sejalan dengan pencaanangan Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) maka diharapkan dapat mengintegrasikan sumber daya yang tersedia dari seluruh stakeholder terkait.

Pada kesempatan tersebut, Ketua AABI Haedar A. Karim, menyampaikan bahwa kerjasama ini menunjukkan bahwa Asosiasi tidak hanya berorientasi mencari keuntungan saja tapi lebih dari itu mampu berkontribusi untuk membina profesionalisme anggotanya. Di kemudian hari dengan adanya kerjasama ini, diharapkan akan mampu membantu pembangunan Infrastruktur lebih lancar lagi.

Kepala BP Konstruksi menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan pelatihan yang akan dilakukan nanti perlu diperhatikan agar Program Pelatihan ini harus dapat mendukung pelaksanaan proyek ke-PU-an di Indonesia di seluruh Satminkal Kementerian PU terutama Direktorat Jenderal Bina Marga. Hasil pelatihan ini nantinya harus mempunyai signifikansi, dengan kata lain SDM yang dilatih harus memenuhi kompetensi yang diminta pasar dengan mengoptimalkan target jumlah pelatihan yang akan dilakukan agar alat yang telah disediakan mempunyai okupansi tinggi dan tidak 'idle'. * (tw)

Pada hari Rabu 08 Januari 2013, Kepala Badan Pembinaan Konstruksi pada saat itu yang saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum, Bambang Goeritno, menyaksikan penandatanganan Kerjasama Pelatihan Operator Alat-alat Berat Bidang Jasa Konstruksi antara Asosiasi Aspal Beton Indonesia (AABI), PT. Rutraindo Perkasa, dengan Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi di Jakarta.

Kesepakatan kerjasama Pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari pembuatan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan modul dengan jabatan kerja Operator Mesin Pencampur Aspal (AMP), dan Operator Mesin Penggalar Aspal yang telah dibuat pada tahun 2011 dan 2012.

Selaras kesiapan bakuan kompetensi tersebut maka perlu dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihannya di TA. 2013 dan seterusnya.

“Saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia sedang giat-giatnya dilakukan, namun sayang di saat yang sama kita kekurangan sumber daya”, ujar Kepala Badan. Sumber daya yang dimaksud meliputi baik peralatan maupun sumber daya manusia yang berkompeten untuk mengoperasikannya.

Selain itu, bagi pihak swasta sebagai produsen tentunya akan lebih menguntungkan jika makin banyak tenaga kompeten yang mampu mengoperasikannya, selain untuk jangka panjang makin meningkatkan produktivitas.





PERTEMUAN ASEAN COORDINATING COMMITTEE ON SERVICES (CCS) KE 72 DI JERUDONG, BRUNEI DARUSSALAM

Oleh: Bayu Dwi Samoedra

Pertemuan ASEAN Coordinating Committee on Services (CCS) yang ke 72 diselenggarakan di Jerudong, Brunei Darussalam pada tanggal 15-19 Januari 2013. Dalam pertemuan ini, anggota tim perundingan/delegasi Indonesia dari Kementerian Pekerjaan Umum diwakili oleh Ir. Anita Tambing, M.Eng. (Kepala bidang Pasar & Daya Saing, PusbinSDI), Ir. Ati Nurzamiati Hazar Zubir, MT. (Kepala bidang Kompetensi Konstruksi, PusbinKPK), Dr. Ir. Krishna Suryanto Pribadi (Anggota IMC Engineering), Ir. Tateng K. Djajasudarma, M.Arch., IAI. (Anggota IMC Arsitektur), Bayu Dwi Samoedra, ST. (Staff Bidang Pasar & Daya Saing, Pusbin SDI), serta Harry Setyawan, ST. (Staff Bidang Kompetensi Konstruksi, PusbinKPK).

Pertemuan/perundingan-perundingan yang dihadiri oleh tim delegasi Indonesia meliputi Roundtable ACPECC ke-4, Roundtable AAC ke-3, ACPECC Meeting ke-19, AAC Meeting ke-15, Business SWG Meeting, Kunjungan Lapangan ke Kampung Ayer, Welcome Dinner, serta Kunjungan Lapangan ke Proyek KBRI Brunei.

Pelaksanaan Business Services Sectoral Working Group (BSSWG)

Pertemuan Business Services Sectoral Working Group dilaksanakan pada tanggal 18-19 Januari 2013 di Brunei Darussalam secara *back to back* dengan ASEAN CCS Meeting ke-72 dengan dihadiri oleh Perwakilan dari seluruh negara anggota ASEAN. Bertindak sebagai pimpinan rapat adalah Mr. Larry Ng Lye Hock dari Singapura. Pertemuan ini membahas hasil-hasil yang telah disepakati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yaitu: Pertemuan Roundtable ACPECC ke-4, Pertemuan Roundtable AAC ke-3, Pertemuan ke-19 ACPECC serta Pertemuan ke-15 AAC.

Hasil pelaksanaan rapat *roundtable ACPECC (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee) ke-4* Adapun Pertemuan Roundtable ASEAN Chartered Professional Engineers Coordinating Committee ke-4 dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 secara *back to back* dengan ACPECC Meeting ke-19 dan ASEAN CCS Meeting ke-72. Pertemuan bertema *Engineering Challenges and Opportunities* ini dihadiri oleh Perwakilan dari 9 (sembilan) negara anggota yaitu: Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam dengan Mr. U Than Myint dari Myanmar dan Dato Paduka Haji Noordin Mohammad Yusuf dari Brunei Darussalam selaku pimpinan rapat. Rapat *Roundtable* ini mendiskusikan cara untuk lebih menyebarluaskan informasi dan menjangkau partisipasi para insinyur dari Negara Anggota ASEAN dalam skema MRA dalam rangka menyongsong ASEAN Economic Community Tahun 2015.

Dalam forum ini para peserta rapat sepakat bahwa kehadiran proyek-proyek strategis di bidang infrastruktur dan energi serta keterbatasan jumlah engineer di dalam negeri akan membutuhkan kehadiran engineer dari

luar. Pada saat ini pun, sebagian engineer di ASEAN sudah saling bekerja sama untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut. Oleh karena itu, dukungan dari peraturan dalam negeri (*domestic laws and regulations*) menjadi sangat diperlukan dalam rangka implementasi MRA. Selain itu juga dibahas tentang 4 hal yaitu Mobilitas ACPE, Infrastruktur ASEAN, Harmonisasi Standar Engineering, dan Program Pertukaran Insinyur Profesional (PEEP). Pada akhirnya, dicapai beberapa usulan/rekomendasi sebagai berikut:

1. Expert Group baru akan didirikan di bawah ACPECC, bertujuan untuk membahas mobilitas ACPE, harmonisasi standarisasi, dan Program Pertukaran Insinyur Profesional (PEEP).
2. Setiap negara anggota ASEAN diharapkan segera memberikan nominasi nama-nama pakar/praktisi untuk mengikuti setiap anggota *Expert Group* tersebut.
3. Setiap *Expert Group* wajib menentukan cara paling tepat untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Disarankan untuk mempererat diskusi atau pembahasan secara elektronik. Lalu, setiap hasilnya dapat dilaporkan pada pertemuan ACPECC.



Hasil pelaksanaan rapat roundtable AAC (ASEAN Architect Council) Ke-3

Pelaksanaan Roundtable ASEAN Architect Council (AAC) ke-3 dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013 di Brunei Darussalam secara *back to back* dengan ASEAN CCS ke-72. Pertemuan ini dihadiri oleh Perwakilan dari 10 (Sepuluh) negara anggota ASEAN. Bertindak sebagai pimpinan rapat adalah Mr. Phongsak dari Thailand. Agenda Pertemuan Roundtable AAC ke-3 secara umum adalah tantangan dari penyebaran Arsitek Profesional Non-ASEAN, perluasan promosi *ASEAN Architect*, panduan lebih jauh dalam berkolaborasi antar sesama ASEAN *Architect*, serta pendidikan arsitektur dan pelatihan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Asia, khususnya Asia Tenggara, menyebabkan kebutuhan infrastruktur semakin meningkat sehingga dibutuhkan Investasi yang besar. Namun demikian, Indonesia masih sangat kekurangan tenaga Arsitek lokal untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut. Sehingga, penyebaran (*proliferation*) atau masuknya Arsitek-arsitek dari mancanegara, khususnya Non-ASEAN, cukup sulit untuk dihindari. Kondisi serupa juga dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Tantangan dari Arsitek Non-ASEAN ini sebaiknya dihadapi dengan memperkuat peraturan dalam negeri



(*domestic regulations*). Peraturan dalam negeri dapat menjadi sebuah alat yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan Arsitek lokal serta menjamin keamanan (*liability*) dalam bekerja. Peraturan dalam negeri sebaiknya juga digunakan sebagai pengatur kode etika profesional dan juga skema kolaborasi antara arsitek lokal dan non-lokal. Di sisi lain, Sekretariat ASEAN diharapkan mengkompilasi dan membuat perbandingan antara peraturan dalam negeri negara-negara anggota ASEAN.

Dalam pembahasan tentang *Promoting The ASEAN Architect*, disepakati bahwa keuntungan yang nyata (*real benefit*) harus lebih diutamakan agar para arsitek lebih tertarik untuk dapat menjadi *ASEAN Architect*. Hal ini dapat dilakukan contohnya dengan membuat sebuah *pilot project* di suatu negara ASEAN yang

dikerjakan oleh para *ASEAN Architect* melalui skema MRA. Pembahasan ini disusul dengan agenda berikutnya yaitu membahas tentang *Guidelines for Collaboration*. Pada pembahasan ini disampaikan paparan mengenai skema kolaborasi bagi arsitek profesional (*RFA Chart*). Pada pembahasan ini ditekankan pentingnya untuk tidak perlu takut berkolaborasi (*do not fear of working together*), serta lebih meningkatkan pertukaran informasi (*exchange information*) terutama dalam menyambut *ASEAN Common Market 2015*. Peserta rapat kembali menekankan pentingnya membuat sebuah *Pilot Project* yang strategis. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan adalah registrasi ini sebaiknya bersifat temporer (per proyek).

Pada pembahasan mengenai *Architecture Education and Training* dibahas outcome yang dihasilkan dari *Architecture Education Working Group* (yang berubah nama menjadi *ASEAN Architecture Education Committee (AAEC)*). Pada tahun 2013 ini diagendakan untuk pergantian sekretariat AAC dari Thailand ke negara lain. Dalam hal ini, sekretariat berencana untuk meminta secara khusus kepada Negara Indonesia dan Filipina untuk bersedia (*voluntarily*) menjadi Sekretariat AAC. Namun, pemindahan sekretariat ini bukanlah hal yang mudah terkait dengan isu masalah pendanaan kegiatan operasional. Sekretariat akan memberikan surat permohonan secara resmi kepada Indonesia dan Filipina agar



dapat ditindaklanjuti. Isu pendanaan ini menjadi hal yang cukup penting untuk dibahas dan dicari skema pendanaan yang tepat. Apabila tidak ada negara yang bersedia menjadi sekretariat AAC, penunjukan akan dilakukan secara *alphabetical order*.

Hasil pelaksanaan rapat ACPECC (ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee) ke-19

Pelaksanaan Rapat ke-19 ASEAN Chartered Professional Engineer Coordinating Committee dilaksanakan pada tanggal 17 Januari 2013 dengan pimpinan rapat Mr. U Than Myint dari Myanmar bersama Eng. Dato Paduka Haji Noordin Mohammad Yusof dari Brunei Darussalam serta didampingi oleh Mr. Leandro A. Conti dari Filipina. Rapat ini dihadiri dari perwakilan oleh 10 (Sepuluh) Negara Anggota ASEAN dan Sekretariat ASEAN.

Pada kesempatan ini, Negara Brunei Darussalam menyampaikan bahwa pihaknya, melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan, telah menyampaikan *Notification of Participation* kepada Sekretariat ASEAN. Dengan ini, Brunei menjadi negara kesepuluh yang telah menyampaikan notifikasi dalam ACPECC. Pihak Brunei Darussalam dan Kamboja juga menyampaikan bahwa *Assesment Statement* akan disampaikan pada pertemuan berikutnya (ACPECC Meeting ke-20). Sementara itu, Negara Laos dan Singapura menyampaikan *update* terhadap *Assesment Statement*. Untuk pendaftaran ASEAN Engineer (ACPE)

yang baru, Malaysia menginformasikan saat ini ada 3 anggota ACPE yang baru dan Singapura juga menambahkan 6 anggota ACPE yang baru. Dengan demikian, saat ini terdapat 542 orang ASEAN Engineer (dengan rincian 99 ACPE dari Indonesia, 163 ACPE dari Malaysia, 196 ACPE dari Singapura dan 84 ACPE dari Vietnam. Sekretariat ASEAN juga menyerahkan sertifikat bagi ASEAN Engineer yang telah mendaftar pada pertemuan ACPECC ke-18 yang lalu. Rapat kemudian membahas lebih lanjut mengenai *outcome* yang dihasilkan pada pertemuan *Roundtable ACPECC* yang bertema *Engineering Challenges and Opportunities* pada 16 Januari 2013. Pada kesempatan ini dibahas tentang draft tentang panduan *Professional Engineers Exchange Programme (PEEP)*, Registered Foreign Professional Engineers (RFPE) serta *Roadmap and Implementation Plan of The MRA on Engineering Services*.

Pelaksanaan ACPECC Meeting ke-20 akan dilaksanakan pada tanggal 02-05 Mei 2013 di Brunei Darussalam secara back to back dengan Pertemuan CCS ke 73.

Kunjungan lapangan ke Kampung Ayer dan Proyek Kantor KBRI di Bandar Seri Begawan

Selain berkulat dalam rangkaian pertemuan *indoor*, para peserta rapat ACPECC juga berkesempatan untuk kunjungan lapangan ke Kampung Ayer sebagai bagian dari rangkaian Agenda *Roundtable ACPECC Meeting* yang ke-4. Kunjungan ini dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2013.

Proyek Kampung Ayer (*Water Village*) adalah suatu Proyek Perintis (*Pilot Project*) yang dilaksanakan oleh Kesultanan Brunei Darussalam. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kampung Ayer agar menjadi lebih teratur, aman dan nyaman untuk ditempati. Di sisi lain, proyek yang mencakup pembangunan 65 unit rumah (berbagai tipe), pembangunan jalan pemukiman, sistem pengairan (bersih dan kotor), ruang terbuka bersama, perancangan landscape, saluran air dan instalasi kebakaran ini juga bertujuan meningkatkan citra Kampung Ayer sebagai warisan berkelanjutan yang membanggakan bagi generasi ke depan.

Pada hari Kamis, 17 Januari 2013, tim delegasi RI yang terdiri dari anggota delegasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Luar Negeri Indonesia berkesempatan untuk mengadakan pertemuan dan makan malam dengan Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam, Handriyanto Kusumo Priyo.

Proyek KBRI di Brunei dibangun di atas area seluas 12.000 meter persegi dan menelan biaya pembangunan sebesar 83 Milyar Rupiah. Bangunannya terdiri atas 4 blok yang terdiri dari blok perkantoran, *hall* dan penampungan TKI. Proses desain bangunan dilakukan oleh PT. Perencana Djaya dan proses konstruksinya dilakukan oleh PT. Utama Karya dengan bekerja sama dengan firma arsitek lokal yaitu HO KWONG YEW, sedangkan untuk tenaga kerja konstruksi berasal dari Indonesia, India dan Bangladesh.

Rangkaian rapat pertemuan dan kunjungan kerja di Brunei Darussalam kali ini diharapkan dapat mempererat pemahaman dan kerja sama antar negara-negara ASEAN yang terlibat di dalamnya untuk dapat menghadapi kompetisi global yang semakin terbuka. Dengan bersama-sama saling mendukung untuk meningkatkan kompetensi dan membuka kesempatan antar sesama negara ASEAN, dapat memperkuat perekonomian terutama di sektor jasa konstruksi. (Mu)



Menyambut Peluang, Menjemput Kejayaan Pasar Konstruksi di Aljazair

Dibandingkan dengan Indonesia, Aljazair memang terbilang baru mengeskap kemerdekaan tepatnya pada 5 Juli 1962. Setelah sekian lama dijajah oleh Perancis. Namun negara yang terletak di ujung utara benua Afrika ini tidak kalah dalam percepatan pembangunan, terutama dalam hal infrastruktur. Apalagi dengan berlimpahnya minyak bumi yang hampir-hampir mampu membiayai semua sektor kehidupan kenegaraan, otomatis menjadikan Aljazair salah satu calon raksasa ekonomi yang patut diperhitungkan saat ini.

Peluang pelaku konstruksi Indonesia berkiprah di pasar Konstruksi Aljazair ternyata juga sangat besar. Apalagi sebagaimana disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Aljazair Ahmad Ni'am Salim, Pemerintah Aljazair sendiri memberikan akses seluas-luasnya kepada pelaku konstruksi nasional. Informasi tersebut disampaikan Ahmad Ni'am Salim saat melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi ketika itu, Bambang Goeritno, dan beberapa perwakilan Perusahaan Konstruksi Nasional beberapa waktu yang lalu.

“Dengan adanya peluang yang terpapar luas seperti ini rasanya tidak boleh kita lewatkan”, tegas Kepala BP Konstruksi. Inilah saatnya bagi pelaku konstruksi Indonesia untuk berkibar di ajang persaingan global, tentunya dengan membawa kompetensi dan kesungguhan dalam bekerja. Disinilah peran Kementerian Pekerjaan Umum untuk mendorong pelaku konstruksi berkiprah di dalam maupun di luar negeri.

Lebih lanjut lagi dikatakan oleh Ahmad Ni'am Salim, bahwa secara khusus peluang yang terbuka selebar-lebarnya bagi Indonesia ini datang langsung dari Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika. Bahkan Presiden Aljazair memberikan pesan langsung kepada Perdana

Menteri Aljazair agar mempersilahkan kontraktor dari Indonesia memilih sendiri proyek yang diinginkan.

Keistimewaan yang diberikan oleh Presiden Aljazair tersebut memang sangat dimaklumi, mengingat Aljazair dan Indonesia yang memiliki kedekatan sejarah. Masih segar dalam ingatan kita saat dulu Presiden RI pertama Soekarno yang memberikan dukungan penuh atas usaha kemerdekaan Aljazair. Ditambah lagi Indonesia yang dianggap 'saudara' karena kesamaan mayoritas penduduknya beragama Islam.

Karenanya Presiden Aljazair mengundang kehadiran Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono ke negaranya, sebagaimana disampaikan saat menerima kunjungan Ketua DPR RI Marzuki Alie bulan November 2012 yang lalu. Dalam hal ini, Presiden RI sendiri menyatakan ketertarikannya menyambut peluang ini, dan dijadwalkan mengunjungi Aljazair dalam rangkaian kunjungan kerja ke Afrika.

Meski demikian sebagaimana disampaikan Dubes RI, belum banyak pelaku konstruksi Indonesia memasuki pasar Aljazair karena belum banyak informasi mengenai potensi pekerjaan konstruksi di Aljazair yang sampai ke Indonesia. Padahal sebagai salah satu negara pengekspor minyak di dunia, Aljazair memiliki modal yang sangat

besar dan siap digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur.

Sebagai gambaran, dengan begitu banyak rencana pembangunan, masing-masing proyek rata-rata bernilai diatas 1 Triliun Rupiah. Nilai proyek di Aljazair bahkan melebihi APBN Indonesia, jumlahnya sekitar tiga kali lipat APBN Indonesia.

Selain itu, ada beberapa hal yang mendukung bagi pelaku nasional berkiprah di Aljazair, antara lain: perubahan kebijakan terkait devisa (per 9 November 2012), yang sebelumnya hanya boleh 20% dibawa ke Indonesia, saat ini 100% boleh dibawa ke tanah air; meskipun berada di tengah-tengah wilayah konflik (berbatasan dengan Libya, Mesir, Tunis, & Tunisia), Aljazair relatif kondusif dimana rakyat mendukung penuh pemerintah; dan seterusnya.

Sebagai gambaran, anggaran yang dimiliki Pemerintah Aljazair menduduki peringkat pertama diantara seluruh negara di benua Afrika. Kekayaan tersebut sudah bisa ditebak didapatkan dari melimpahnya minyak bumi di sana, yang hanya bisa dikalahkan oleh Arab Saudi. Dan dengan pemerintahan yang bergaya 'sosialis', otomatis pemegang kekuasaan mengendalikan penuh penggunaan dana untuk dikucurkan bagi kepentingan rakyatnya.



Maka jangan terheran-heran jika anda temui bahwa berbagai fasilitas umum di Aljazair gratis. Pun fasilitas tersebut dibangun dengan apik tidak sembarangan, atau dengan kata lain berdana besar. Fasilitas umum yang gratis tersebut meliputi kesehatan, sekolah, hingga bahkan tidak tanggung-tanggung jalan tol sepanjang ribuan kilometer pun gratis!

Saat ini bahkan Pemerintah Aljazair sedang giat-giatnya membangun perumahan atau rumah susun gratis, untuk dua juta orang miskin. Jangan dibayangkan orang miskin di Aljazair seperti orang-orang miskin di Indonesia, sebab standar kemiskinan di

sana ternyata mereka yang masih memiliki kendaraan seperti mobil, namun belum memiliki tempat tinggal tetap. Sungguh kontras!

Dengan gambaran demikian, sebagaimana disampaikan Kepala BP Konstruksi, tidak kemudian menghilangkan kehati-hatian dari para pelaku konstruksi Indonesia. Untuk itulah dihimbau para pelaku konstruksi dari Indonesia nantinya maju bersama atau membentuk konsorsium. Dapat juga dengan cara maju sendiri-sendiri namun nantinya dikerjakan bersama-sama. Hal ini diperlukan mengingat di tempat asing lebih baik segala hal dikerjakan dan ditanggung bersama.

Beberapa pelaku konstruksi yang hadir dalam pertemuan ini, antara lain PT. Waskita Karya, PT. Wijaya Karya, dan PT. Nusantara Konstruksi Engineering menyatakan siap dan berusaha untuk menjajaki kemungkinan yang ada.

Tidak ada salahnya kita alihkan perhatian ke pasar konstruksi ke negeri nun jauh di seberang samudera sana. Mungkin dari sanalah, kejayaan Nusantara yang dulu sempat digenggam kala masa raja diraja Kutai Kertanegara hingga Majapahit di Jawa Dwipa akan kembali ke bumi ibu pertiwi. * (tw)

Intermezo

Tes masuk pesta

Sebuah resepsi sedang berlangsung di Paris. Salah seorang tamu, Presiden Numeri dari Sudan, kehilangan surat undangannya.

Namun begitu, ia tetap melangkah ke pintu dan berkata kepada petugas yang ada di sana diterangkannya siapa dirinya sebenarnya.

"Tapi dari mana kami bisa tahu kalau apa yang kau katakan itu benar?" tanya salah seorang petugas.

"Sejam yang lalu Pablo Picasso juga datang kemari dan mengatakan bahwa surat undangannya hilang, Kami berikan cat dan kuas kepadanya. Dalam sekejap mata saja ia berhasil membuat sebuah lukisan yang luar biasa. Lalu, setengah jam yang lalu Pablo Casals datang, juga tanpa surat undangan. Kami berikan biola kepadanya. Ia memainkan sebuah musik yang indah ..."

"Siapa Pablo Picasso dan Pablo Casals itu?"

"Cukup" kata petugas tersebut. "Berarti anda memang benar Presiden Numeri"

<http://ketawa.com/2004/04/28/5-tes-masuk-pesta.html>

Kalau Indonesia dijajah lagi

Banyak kesalahan atau kekurangan yang dialami bangsa kita yang dihubungkan dengan kondisi kita yang dulu dijajah oleh Belanda. Belanda kan bukan sebuah negara yang besar, tidak punya modal, tidak punya pemikir-pemikir ulung, jadi mereka tidak memberikan apa-apa kepada kita, malah merampok kita habis-habisan. Lain dengan India yang dijajah Inggris, atau Filipina yang dijajah Amerika. Negara-negara penjajah yang itu punya sesuatu yang diberikan kepada negara-negara yang dijajah, misalnya saja tentang sistim hukum yang lebih teratur, dsb.

Nah, lalu ada pemikiran gila supaya Inggris dan Amerika memberikan sesuatu kepada kita. Bagaimana caranya ? Kita nyatakan perang melawan Inggris dan Amerika ! Lho, kenapa begitu ? Logikanya kita kan kalah...jadi kita akan dijajah lagi oleh Amerikan dan Inggris. Masalahnya sekarang, bukannya kalau kita kalah. Masalahnya adalah, bagaimana kalau Indonesia yang menang ???

<http://ketawa.com/2002/09/02/36-kalau-indonesia-dijajah-lagi.html>

Berlangganan Toko Bunga untuk Ulang Tahun Pernikahan dan Ulang Tahun Istri

Seorang suami pelupa pikir dia telah menyelesaikan masalahnya mencoba mengingat hari ulang tahun istrinya dan ulang tahun pernikahan mereka. Dia mendaftar kartu pelanggan di sebuah toko bunga, memberikan informasi tanggal dan instruksi untuk mengirim bunga kepada istrinya pada tanggal-tanggal tersebut, bersama dengan catatan yang tepat, "dari suami yang sangat menyayangimu."

Istrinya sangat senang dengan perhatian suaminya ini dan semua berjalan lancar sampai suatu hari ketika ia pulang ia melihat sebuah karangan bunga, mencium istrinya dan berkata sambil lalu, "Bunga yang bagus, Sayang. Dari mana kau mendapatkannya?"

<http://ketawa.com/2013/02/11/8578-berlangganan-toko-bunga-untuk-ulang-tahun-pernikah.html>

Banteng yang Aman

Seorang pria sedang mengemudi di pedesaan dan ia berhenti untuk memetik beberapa tangkai bunga di pinggir jalan. Tiba-tiba di dekatnya sudah ada banteng besar yang mendengus mendekati dia.

Pemuda itu berteriak memanggil petani yang ada di dekat situ, "Pak! Apakah banteng ini aman?"

Petani itu berteriak, "Tentu saja, banteng itu sangat aman. Namun anda sekarang yang tidak aman..."

<http://ketawa.com/2012/12/20/8463-banteng-yang-aman.html>

Menyetir Mobil Melewati Genangan

Ketika sedang melakukan perjalanan antar kota, seorang pengendara mobil berhenti di depan sebuah genangan raksasa yang menutupi seluruh jalan.

Dia melihat seorang petani bersandar di pagar, melihat genangan air.

"Bapak, apakah menurut Anda ini aman untuk menyeberang?" teriaknyanya.

"Oh, kurasa begitu.". Petani itu menjawab.

Pria mengajukan mobilnya ke genangan, dimana mobilnya langsung tenggelam. Genangan itu begitu dalam, ia harus keluar melalui jendela mobil dan berenang kembali ke tepi. Ketika dia keluar dia marah kepada petani tua.

"Saya pikir Anda mengatakan genangan itu aman untuk diseberangi!"

Berdiri petani kembali dan menggaruk-garuk kepalanya. "Nah, itu dia, tadi saya lihat genangan itu cuma setinggi dada bebek-bebek saya yang menyeberang sebelum Anda!"

<http://ketawa.com/2012/12/16/8458-menyetir-mobil-melewati-genangan.html>

PISAH SAMBUT KEPALA BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI



Senin (04/02) lalu merupakan hari bersejarah bagi Badan Pembinaan Konstruksi. Karena pada hari tersebut dilaksanakan pisah sambut pucuk pimpinan Badan Pembinaan Konstruksi, yang menjadi lokomotif gerbong-gerbong pembinaan konstruksi di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto pada akhir Januari 2013, melantik Pejabat Eselon I, II, dan III di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Diantaranya antara lain Bambang Goeritno yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dilantik menjadi Inspektur Jenderal Kementerian PU, dan Hedyanto W. Husaini yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat dilantik menjadi Kepala Badan Pembinaan Konstruksi.

Pelantikan tersebut sekaligus menjadi event penyerahan estafet Pembina Konstruksi dari pejabat lama ke pejabat baru. Banyak kebijakan dan kenangan yang ditorehkan pejabat lama. Kenangan yang telah terbentuk karena

aliran sang waktu menjadikan pisah sambut kali ini terasa begitu berkesan. Banyak pesan dan kesan yang disampaikan di acara ini.

“Seluruh jajaran Badan Pembinaan Konstruksi harus terus maju, makin giat bekerja, karena tugas pembangunan Infrastruktur di Indonesia tidak berkurang tapi makin bertambah”, ujar Inspektur Jenderal Kementerian PU Bambang Goeritno. Karena itulah wajib bagi setiap diri di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi meningkatkan kemampuan dirinya, bagi kemajuan dan kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disambut baik oleh Kepala BP Konstruksi, Hedyanto W. Husaini, bahwa dirinya beserta seluruh jajaran BP Konstruksi akan melanjutkan apa yang telah dicapai oleh para pendahulu, dengan segenap kemampuan. “Kami siap bermitra dengan seluruh bagian



dunia konstruksi di Indonesia, tentunya dengan penuh tanggungjawab”, ujar Hedyanto. Untuk itu, Hedyanto akan berkoordinasi dengan semua pihak terkait termasuk dengan para pendahulu di lingkungan Badan Pembinaan Konstruksi.

Sedangkan kesan dan pesan dari pegawai di BP Konstruksi disampaikan oleh Kepala Balai Peningkatan Penyelenggaraan Konstruksi Savitri Rusdyanti. Kesan yang dibacakan beragam, yang tidak jarang mengundang gelak tawa sekaligus keharuan. Acara ini bernuansa non formal karena diselingi dengan hiburan, para pejabat yang menampilkan kemampuannya dalam berolah vokal.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi yang baru, Hedyanto W. Husaini, pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PU Bina Marga Sumatera Barat selama kurang lebih tiga tahun (1999-2001). Setelah itu beliau menjabat sebagai Kepala Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat dari kurun waktu tahun 2001 s.d. 2006, dan kemudian selama satu tahun berikutnya menjabat sebagai Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Karir Hedyanto W. Husaini berikutnya mulai dirintis di pusat, dengan menjabat sebagai Direktur Jalan dan Jembatan Wilayah Barat Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum dari tahun 2007 s.d. 2010. Kemudian menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Strategis Setjen Kementerian PU selama kurun waktu 2010 hingga pertengahan tahun 2012. Dan sejak pertengahan tahun 2012 Hedyanto W. Husaini menjabat sebagai Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya dan Peran Masyarakat, hingga di awal tahun 2013 dilantik Menteri PU menjadi Kepala Badan Pembinaan Konstruksi.

Lokomotif suatu saat akan berganti. Menggantikan yang lama, diganti yang baru. Tapi satu yang pasti kereta akan tetap berjalan, harus berjalan. Membawa gerbong-gerbong harapan menyongsong pembaharuan sektor Konstruksi Indonesia. * (tw)

Bauma 2013

30th International Trade Fair for Construction Machinery, Building Material Machines, Mining Machines, Construction Vehicles and Construction Equipment. 15-21 April 2013, Munich



Fascination Bauma 2013

Giant machines on 555,000 m² of exhibition space with 3,256 exhibitors and 420,170 visitors—bauma is the largest and perhaps the most impressive trade fair in the world. However, the undisputed leading international trade fair is also enthralling because it is so comprehensive. It features all sectors, all market leaders and plenty of innovations.



PARTNER
COUNTRY

Indonesia